

SEJARAH DIPLOMASI ROEM-ROIJEN DALAM PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1949

Oleh:

Agus Budiman¹⁾

¹⁾Dosen Prodi. Pendidikan Sejarah FKIP-UNIGAL

ABSTRAK

Mohammad Roem dan Dr. J.H. van Roijen merupakan dua nama wakil delegasi antara Indonesia dan Belanda yang menandatangani sebuah persetujuan yang diwakili oleh KTN (Komisi Tiga Negara) diantaranya Belgia sebagai wakil dari Belanda, Australia sebagai wakil dari Indonesia, dan Amerika sebagai penengah antara keduanya. Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, maka akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan, yang kemudian dikenal dengan nama “*Roem-Royen Statements*”. Pada awalnya Persetujuan Roem-Roijentersebut ternyata tidak dapat diterima begitu saja oleh sebagian besar kalangan politisi maupun petinggi militer dari kedua belah pihak (Republik Indonesia dan Belanda),keduanyasama-sama berasumsi bahwa jika menerima hasil Perundingan Roem-Roijen berarti menerima suatu kekalahan. Namun demikian, akhirnya baik pemerintah Belanda maupun pihak R.I.mau menerima hasil persetujuan tersebut.Adapun inti dari Persetujuan Roem-Roijen adalah pelaksanaan gencatan senjata dan pengembalian Pemerintahan R.I ke Ibukota Yogyakarta, disertai dengan penarikan mundur pasukan Belanda di bawah pengawasan UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*).Setelah Ibukota Yogyakarta sepenuhnya dikosongkan dari pasukanBelanda maka pada tanggal 29 Juni 1949, Tentara Republik Indonesia (TRI) dan Presiden, Wakil Presiden, beserta para pemimpin Republik Indonesia lainnya, kembali ke Ibukota Yogyakarta sehingga mereka dapat menjalankan kembali tugas dan wewenang dalam pemerintahannya seperti semula.Terjadinya peristiwa Perundingan Roem-Roijen adalah merupakan salah satu cara perjuangan Bangsa Indonesia guna mempertahankan kemerdekaannya melalui strategi diplomasi, sehingga kembalinya kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia ke Ibukota Yogyakarta adalah suatu realitas yang pada gilirannya dapat memulihkan kembali sistem keamanan, ketertiban, dan perdamaian di seluruh tanah air Indonesia, dan akan menjadi daya dorong kuat bagi terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Negeri Belanda.

Kata kunci: Diplomasi, Roem-Roijen, dan Kemerdekaan.

PENDAHULUAN

Meskipun negara Republik Indonesia telah berhasil diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden pertama Ir Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Mochammad Hatta, namun kenyataannya hingga beberapa tahun setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut, pihak Belanda belum mau mengakui kehadiran Negara Bangsa yang baru lahir itu. Hal yang cukup tragis mengenai

persoalan ini terutama setelah datangnya tiga divisi tentara Sekutu dibawah pimpinan Sir Philip Christison yang merupakan komando *SEAC (South East Asia Command)* yang diberi nama *Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI)*, dengan tugas:

1. Menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang;
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Serikat;
3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk kemudian dipulangkan;
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil;
5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Serikat. (Notosusanto, 1984: 122).

Namun kehadiran pasukan Sekutu itu ternyata membonceng tentara *NICA (Netherlands Indies Civil Administration)* yang memiliki tujuan lain, yakni ingin menguasai kembali wilayah kolonialnya di nusantara, sehingga Belanda sempat melakukan dua kali agresinya di wilayah tanah ijar yang mereka *claim* sebagai tindakan Aksi Polisionil melalui Agresi Militer Belanda ke-1 dibawah pimpinan Letnan Jenderal S. Spoor, salah seorang Panglima militer Belanda yang berkedudukan di Jakarta.

Adapun pihak Belanda berargumen mengenai perlunya dilakukan agresi militer pertama tersebut yakni dengan alasan politis tentang perbedaan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian Linggarjati, dimana pemerintah Belanda menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi bisa mentaati perjanjian tersebut, sehingga Belanda merasa tidak terikat dan bebas bertindak, yang pada gilirannya pada tanggal 15 Juli 1947 pihak Belanda di bawah pimpinan Dr. H.J. van Mook mengirim ancaman-ancaman dan mempersiapkan pasukannya untuk menyerang daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, hingga terjadilah serangan pasukan Belanda tersebut melalui agresi militernya yang pertama yakni pada tanggal 20 Juli 1947.

Agresi Militer Belanda ke-1 berakhir melalui Perundingan Renville di atas dek kapal perang Amerika Serikat (US Renville) pada tanggal 8 Desember 1947, namun kurang lebih satu tahun setelah peristiwa tersebut tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang ke-2 karena mereka merasa bahwa kedudukan yang dialami oleh pemerintah Belanda dalam persoalan dengan pihak Republik Indonesia saat itu kurang menguntungkan.

Disamping itu Belanda juga membuat strategi penguasaan kembali bekas wilayah jajahannya melalui jalur politik (non agresi), yakni dengan mendirikan negara-negara boneka (federal) yang dihimpun dalam wadah Negara-Negara Federasi antara pihak Belanda dengan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang kemudian dikenal dengan nama BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) pada tanggal 27 Mei 1948, dibawah pimpinan Dr. H.J. van Mook dengan tujuan mempersempit wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Adapun terjadinya peristiwa Agresi Militer Belanda ke-2, sebenarnya lebih merupakan gagasan dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda yang berkedudukan di tanah air, yakni Dr. J.L.M. Beel, yang menyatakan bahwa pihaknya harus segera melancarkan agresi kembali yang kedua kalinya dengan target melemahkan

perlawanan pihak R.I. melalui strategi penguasaan Ibukota Yogyakarta dan mengasingkan Presiden, Wakil Presiden, serta para pejabat tinggi Republik Indonesia lainnya. (SlametMuljana, 2008: 228)

Setelah Ibukota Republik Indonesia (Yogyakarta) berhasil diduduki oleh tentara Belanda, maka pihak Belanda berkali-kali mengumumkan kepada publik nasional maupun internasional bahwa R.I. sudah lenyap, yang ada hanya para pemimpin terkemukanya, saja seperti; Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, H. Agus Salim, Syahrir, dan yang lainnya. Tetapi lain halnya dengan Panitia Jasa-Jasa Baik Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang masih tetap memandang bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Mochammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta para pejabat tinggi lainnya dalam kedudukannya masing-masing.

Sekalipun para pemimpin Republik Indonesia telah ditawan oleh pasukan Belanda, namun saat itu Presiden Soekarno sempat mengirimkan pesan melalui radiogram kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang tengah mengadakan lawatannya ke wilayah Sumatera, guna membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera sebagai suatu mandat politik, agar roda pemerintahan Republik Indonesia senantiasa berjalan sebagaimana mestinya, bahkan secara terus menerus PDRI melakukan komunikasi dengan dunia luar.

Tindakan pemerintah Belanda dalam melancarkan agresi militernya yang ke-2 ternyata tidak mampu menghasilkan sesuatu yang relevan bagi pihak Belanda sendiri, adapun alasan utama Belanda melakukan agresinya tersebut adalah bahwa pihak Belanda ingin melenyapkan sama sekali perlawanan pihak Republik dengan cara menaklukkan Ibukota Yogyakarta, karena daerah tersebut dianggap sebagai sumber semangat perlawanan dan perjuangan Bangsa Indonesia, namun ternyata harapannya meleset karena Republik Indonesia tetap saja eksis.

Dengan agresinya yang ke-2 itu, malah menjadikan kedudukan pihak Belanda dalam peta politik internasional semakin tereliminasi, bahkan lebih jauhnya lagi banyak pula opini masyarakat berkembang di negeri Belanda sendiri yang sangat meragukan terhadap manfaat dari keputusan agresinya itu, mereka beranggapan bahwa agresinya yang ke-2 tersebut tidak lain hanyalah ingin melanjutkan agresinya yang pertama yang dihentikan atas perintah Dewan Keamanan Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

Dengan demikian maka sejak saat itu pihak badan dunia LBB terus menerus memperhatikan Negara Republik Indonesia yang mendapat tekanan dari pihak Belanda, namun di satu sisi memiliki kesungguhan yang luar biasa dalam melakukan perlawanan mempertahankan wilayahnya sendiri dari agresi tersebut. Selain itu pihak R.I. juga tidak lepas dari perjuangan diplomatik para *founding fathers* yang diarahkan untuk meraih empati dunia internasional, seperti halnya upaya pemberian bantuan sekitar 50.000 ton beras kepada Negara India, sehingga masalah internal dalam negeri Indonesia mendapat perhatian serius dari LBB.

Dengan berbagai macam pertimbangan serta melihat hubungan antarkedua negara yakni Belanda dan Indonesia yang sudah semakin tidak harmonis lagi, maka pada gilirannya Dewan Keamanan LBB mendesak pemerintah Belanda untuk mengadakan perundingan dengan pihak Republik Indonesia agar permasalahan tersebut segera berakhir.

Sekaitan dengan hal itu Dewan Keamanan LBB juga sebelumnya telah mengeluarkan sebuah resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 yang berkenaan dengan permasalahan Agresi Militer Belanda ke-1, sebagai berikut:

Dewan Keamanan menyerukan kepada kedua pihak:

- a. Segera menghentikan tindakan-tindakan pernusuhan dan;
- b. Menyelesaikan sengketanya dengan arbitrase atau dengan cara damai lainnya dan senantiasa memberitahukan kepada Dewan Keamanan untuk kemajuan dari usahanya". (Roem, 1972: 90)

Atas dasar resolusi tersebut maka akhirnya konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Belanda, dapat segera diakhiri melalui jalur diplomasi, yakni dengan digelarnya Perundingan Roem-Roijen pada tanggal 14 April 1949, dimana dari pihak Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem dan dari pihak Belanda oleh Dr. J.H. van Roijen, atas prakarsa UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*) di Hotel Des Indes Jakarta. Pada saat itu atas anjuran pihak UNCI diadakan pertukaran pernyataan yang disebut dengan "van Roijen-Roem Statements" atau "Persetujuan Roem-Roijen" mengenai penyerahan daerah Ibukota Yogyakarta kepada Pemerintah Republik Indonesia (Roem, 1972: 96)

Adapun isi dari hasil perundingan Roem-Roijen lainnya adalah harus dilakukannya gencatan senjata, sehingga paling tidak untuk sementara waktu dapat menghentikan jalannya peperangan, sekaligus dapat meminimalisasi jatuhnya korban perang dari kedua belah pihak.

Sementara itu Perundingan Roem-Roijen yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 April 1949 di pimpin oleh Merle Cochran, salah seorang anggota Komisi LBB dari Negara Amerika Serikat. (SlametMuljana, 2008: 218). Namun demikian sebelumnya pihak Amerika Serikat telah memerintahkan wakil tetapnya di LBB yakni Dr. Frank P. Graham untuk berangkat ke Indonesia guna membentuk Panitia Jasa Baik (*Committee of Good Offices*), berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan LBB yang kedua, yang ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 1947, sebagai berikut:

"Dewan Keamanan memutuskan memberikan jasa-jasa baiknya kepada kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan sengketanya secara damai, sesuai dengan poin (b) dari resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 1 Agustus 1947. Dewan Keamanan menyatakan kesediannya, jika diminta oleh kedua belah pihak, membantunya menyelesaikan dengan sebuah panitia dari dewan, yang terdiri dari tiga anggota dewan, tiap pihak menunjuk satu, dan anggota ketiga diangkat oleh kedua anggota yang sudah ditunjuk" (Roem, 1972: 74).

Setelah dikeluarkannya resolusi tersebut dan dapat diterima oleh pihak Belanda maupun pihak Indonesia, maka Belanda memilih Belgia sebagai wakilnya, sedangkan pihak Republik Indonesia memilih Australia sebagai wakilnya. Kemudian diantara kedua negara tersebut (Belanda dan Indonesia) sepakat memilih Amerika Serikat sebagai negar ketiga (arbiter). Dengan demikian maka Dewan Keamanan LBB berhasil membuat keputusan mengenai pemecahan masalah antara pihak Republik Indonesia dengan pihak Belanda melalui pemberian wewenang kepada Komisi Tiga Negara (KTN) LBB untuk turut

serta membantu menyelesaikan masalah antara pihak Belanda dengan Republik Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang terselenggaranya Perundingan Roem-Roijen pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1949?
2. Bagaimana dampak yang timbul setelah diadakannya Perundingan Roem-Roijentahun 1949?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode sejarah atau metode historis dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, dan (4) historiografi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini adalah melalui kajian pustaka atau studi literatur, yakni penulis mengumpulkan buku-buku sumber yang berhubungan dengan permasalahan, membaca, menelaah, menyeleksi, dan kemudian menuangkannya kedalam skripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas Mengenai Situasi Politik di Negara Belanda

Pada bulan Juli 1948 di Negara Belanda telah dilangsungkan suatu proses politik berupa Pemilihan Umum (Pemilu) yang hasilnya dimenangkan oleh Partai Katholik, namun khususnya mengenai permasalahan wilayah Hindia Belanda atau Indonesia, partai tersebut mempunyai pandangan kurang baik terhadap Dr. H.J. van Mook yang dianggap terlalu progresif dalam pemecahan masalah Indonesia, seperti halnya dalam berbagai perundingan dengan pihak Republik Indonesia yang dianggap terlalu banyak memberikan konsesi.

Selain itu Partai Katholik juga menganggap bahwa Dr. H.J. van Mook *overlap* dalam mengambil berbagai kebijakan di wilayah Hindia Belanda sehingga kerap bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Belanda sendiri di Den Haag. Dengan sikap dari Dr. H.J. van Mook yang dianggap terlalu bebas serta mendapat tekanan yang terus menerus dari pemerintah Belanda melalui parlemennya (Staten Generale), maka akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1948 Dr. H.J. van Mook menyampaikan surat permohonan pembebasan tugasannya dari semua jabatan yang tengah diembannya kepada Ratu Juliana. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh partai Katholik untuk menggantikan Dr. H.J. van Mook oleh Dr. L.J.M. Beel, salah seorang mantan pejabat menteri. Setelah itu segera diadakan perundingan untuk membangun kabinet baru Belanda yang akhirnya terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1948 dengan nama kabinet "Dries van Schaick".

Dalam komposisi kabinet baru itu, seorang konglomerat atau pengusaha besar Belanda yang bernama Stikker dari Partai Liberal, berhasil menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri, Stikker saat itu dikenal sebagai orang yang mempunyai pandangan pragmatis terhadap masalah Indonesia. Dengan demikian

maka Stikker terus memantau berbagai perkembangan yang berkaitan dengan persoalan di Indonesia. Namun setelah sekian lama melakukan *monitoring* terhadap timbulnya masalah krisis politik di Indonesia, maka dia berkesimpulan bahwa berbagai jalan yang di lakukan sebelumnya ternyata tidak memperoleh hasil yang signifikan bagi pemerintah Belanda, terutama mengenai perundingan antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia berdasarkan usul Cochran (wakil Amerika Serikat dari UNCI), sehingga Stikker bermaksud mengambil alih prakarsa Merle Cochran dengan mengajukan gagasan untuk menembus jalan buntu yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai “Usul Cochran” (*Cochran-Proposal*). Adapun Gagasan Cochran tersebut berisi tentang saran dalam bidang politik, keamanan, dan keuangan yang meminta kepada pihak Belanda dan pihak Republik untuk dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam menyelesaikan masalah di Indonesia. (Soejitno Hardjosoediro, 1987: 161)

Situasi Politik di Indonesia

Sementara itu situasi dan kondisi politik di Indonesia sendiri setelah keberhasilan pemerintahannya yang dipimpin oleh Wakil Presiden/Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta dalam menumpas pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 20 September 1948, menjadikan Negara Amerika Serikat menaruh simpati terhadap perjuangan Bangsa Indonesia, hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang wajar karena secara kebetulan Washington dan Moskow saat itu tengah berada dalam konstalasi terjadinya “Perang Dingin”, dan hal itu juga sudah diketahui benar oleh Stikker.

Setelah Stikker dapat memastikan bahwa pihak Amerika Serikat ternyata lebih bersimpati terhadap pihak Republik Indonesia, maka Stikker mengambil inisiatif untuk bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marshall dengan tujuan hendak memberikan penjelasan mengenai situasi perkembangan politik di Indonesia menurut versi Belanda yang dianggapnya sudah sangat darurat akibat “kegagalan” perundingan antara pihak Republik Indonesia dengan pihak Belanda.

Stikker berhasil menemui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marshall di Washington guna membahas permasalahannya dengan pihak Republik Indonesia, kemudian setelah itu dengan berbagai pertimbangannya Stikker mempunyai keinginan bertemu dengan Mohammad Hatta, sehingga dia memutuskan untuk berangkat ke Jakarta dan tiba pada tanggal 31 Oktober 1948, sekaligus guna meninjau situasi politik serta mengevaluasi perkembangan perundingan antara pihak Pemerintah Belanda dengan pihak Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Nopember 1948, Stikker bersama pejabat tinggi kementerian luar negeri Belanda, Mr Blom melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta untuk menemui Perdana Menteri Mohammad Hatta, dan nampaknya pembicaraan antara Stikker dengan Hatta berlangsung dengan lancar dalam suasana yang cukup ramah (Mohamad Roem 1972: 89)

Setelah pertemuan dengan Mohammad Hatta di Yogyakarta dianggap selesai, maka pada tanggal 6 Nopember 1948 Stikker kembali ke Jakarta dengan janji bahwa dia akan segera ke Yogyakarta lagi secepatnya guna mengadakan pertemuan berikutnya, namun karena terjadi suatu insiden maka Sukker

membatalkan janjinya untuk kembali ke Yogyakarta, dia hanya mengirim beberapa utusannya ke Yogyakarta untuk meneruskan pembicaraannya dengan pihak Republik Indonesia, yang berlangsung dari tanggal 7 Nopember 1948 sampai dengan tanggal 9 Nopember 1948.

Sesuai dengan hasil perundingan tersebut maka Hattasegera menyampaikan suatu *aide memoire* secara panjang lebar, yang dengan jelas disebutkan mengenai pendirian Pemerintah Republik Indonesia terhadap masalah-masalah penting yang berkaitan dengan kedudukan Wakil Tinggi Mahkota Belanda dalam masa peralihan, masalah keamanan, masalah pertahanan militer, masalah ekonomi, dan masalah keuangan. Menteri Luar Negeri Belanda, Stikker akhirnya dapat menerima *aide memoire* Wakil Presiden/Perdana Menteri Republik Indonesia, sehingga diharapkan dapat menembus kebuntuan perundingan-perundingan sebelumnya.

Namun demikian Wakil Tinggi Mahkota Belanda untuk wilayah Hindia Belanda, Dr. J.L.M. Beel ternyata tidak dapat menerimanya dan menganggap bahwa saran-saran Mohammad Hatta tersebut tidak bisa memberikan jaminan baru yang dapat digunakan sebagai dasar dari suatu perundingan berikutnya yang mungkin akan berhasil, sehingga Beel kemudian mengirimkan telegram yang panjang lebar kepada pemerintah Belanda, selain itu Beel juga mengusulkan agar perundingan apapun dengan pihak Indonesia untuk segera dihentikan, karena hal itu menurutnya tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

Pandangan Beel tersebut mendapat dukungan penuh dari Jenderal S. Spoor, Laksamana Pingke, dan Wakil Kementerian Luar Negeri Belanda di Jakarta, yakni Elink Schermerhorn. Dengan demikian jelas bahwa jika pendirian Beel tersebut akhirnya dapat diterima oleh Pemerintah Belanda, maka hal ini berarti bahwa alternatif yang akan ditempuh oleh Pemerintah Belanda dalam menyelesaikan persoalannya dengan pihak Republik Indonesia adalah melalui aksi militer. (Mohamad Roem, 1972: 108)

Berbeda dengan saran Beel, Kabinet Belanda dalam salah satu agenda sidangnya justru menyatakan bahwa aksi militer terhadap Republik Indonesia akan membawakan konsekuensi politik yang jauh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, sehingga saat itu Sidang Kabinet Belanda memutuskan untuk meneruskan penyelesaian dengan pihak Republik Indonesia melalui meja perundingan.

Sementara itu pihak Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) terutama Wakil Amerika Serikat, Merle Cochran dalam komisi itu menyatakan kekecewaannya atas kegagalan perundingan antara Mohammad Hatta dengan delegasi tingkat menteri Belanda yang dipimpin oleh Sassen. Oleh karena itu Cochran sangat meyakini bahwa dengan gagalnya perundingan antara Mohammad Hatta dan delegasi tingkat menteri Belanda tersebut, maka pihak Belanda akan melihat perundingan itu sebagai usaha terakhir untuk memperoleh penyelesaian masalah Indonesia melalui jalan damai, sehingga akan menimbulkan bahaya dilancarkannya aksi militer oleh pihak Belanda. Untuk itu maka Cochran membujuk Sassen dan Stikker untuk menemui kembali Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta dengan tujuan agar salah pengertian

atau perbedaan pandangan dalam perundingan terakhir dapat segera diatasi. Sekaitan dengan itu, Hatta menyatakan hal sebagai berikut:

“Mereka datang untuk membicarakan usul pemerintah Belanda supaya pemerintah Republik Indonesia bersedia menerima penyerahan kedaulatan tanpa masa peralihan. Kami menolak usul itu”.
(Moh. Hatta, 1979: 302)

Dalam persoalan ini sebenarnya Stikker mempunyai pandangan lain dibanding dengan pemikiran Sassen. Stikker masih ingin melanjutkan perundingan dengan pihak Republik Indonesia, terlebih setelah Stikker membaca surat terakhirnya Hatta yang ditujukan kepada Merle Cochran, yang oleh Stikker dianggap masih mampu membuka jalan untuk mencapai kompromi politik antara pihak Republik Indonesia dengan pihak Belanda, khususnya mengenai masalah-masalah yang belum diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

Namun demikian Stikker tidak dapat berbuat banyak karena pada akhirnya Kabinet Pemerintah Belanda memutuskan untuk melancarkan aksi militernya terhadap pihak Republik Indonesia setelah sebelumnya menerima laporan progres (*progress report*) dari Elink Schermerhorn, artinya bahwa pihak Belanda tidak dapat menyetujui *aide-memoire* yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta pada tanggal 9 Nopember 1948, yang berisikan saran mengenai jalan keluar dari kebuntuan yang menghantui perundingan antara pihak Pemerintah Belanda dengan pihak Republik Indonesia.

Berdasarkan perkembangan itu maka Wakil Ketua Delegasi Belanda Elink Schermerhorn menyampaikan surat kepada Merle Cochran pada 18 Desember 1948, untuk memberitahu Komisi Tiga Negara (KTN) bahwa sikap Pemerintah Belanda berdasarkan pada Pasal 10 mengenai Persetujuan Gencatan Senjata, telah membatalkan hal tersebut terhitung mulai tanggal 19 Desember 1948 dengan alasan bahwa pihak Republik tidak mematuhi terhadap gencatan senjata itu. (Mohamad Roem, 1972: 80)

Belanda Melancarkan Agresi Militer Ke-2

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Belanda sebenarnya tidak rela begitu saja untuk melepaskan wilayah jajahannya di nusantara melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dengan demikian maka Belanda mencoba menempuh berbagai cara agar dapat kembali menguasai tanah air, baik melalui meja perundingan maupun dengan aksi militernya yang pertama pada 20 Juli 1947 yang akhirnya dihentikan atas dasar Persetujuan Renville.

Berbagai perundingan berikutnya terus dilakukan dengan pihak Pemerintah Republik Indonesia yang juga sempat ditengahi oleh pihak ketiga atas perintah Dewan Keamanan Liga Bangsa-Bangsa (LBB), namun demikian segala upaya perundingan tersebut dianggap tidak bisa memihak kepadanya, hingga pada gilirannya sekitar tengah malam antara tanggal 18-19 Desember 1948 pihak Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang kedua terhadap wilayah Negara Republik Indonesia. Sekaitan dengan itu Merle Cochran dan rekannya Cuts yang tengah berada di Kaliurang Yogyakarta menyimpulkan bahwa

Pemerintah Belanda telah melanggar pasal 10 Persetujuan Gencatan Senjata, kemudian kembalinya mereka dari Yogyakarta, segera mengadakan perundingan antar semua anggota Komisi Tiga Negara (KTN) untuk mengirimkan kawat kepada Dewan Keamanan PBB bahwa telah terjadi pertikaian bersenjata antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Adapun bunyi kawat tersebut adalah sebagai berikut:

“Komisi jasa-jasa baik (KTN) menyerukan dengan sangat kepada Dewan Keamanan PBB supaya peperangan di Indonesia yang berarti pelanggaran terhadap persetujuan gencatan senjata yang ditandatangani pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Renville ditinjau (diteliti) dengan sangat mendesak”. (Ide Anak Agung Gde Agung, 1991: 207).

KTN pun akhirnya tidak dapat berbuat banyak, selain menunggu keputusan dari Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi pertikaian bersenjata antara pihak Belanda dengan pihak Republik Indonesia. Sementara itu pada agresinya yang kedua ini, yang disertai dengan keunggulan senjata serta dukungan serangan udara, pasukan Belanda dalam waktu yang singkat berhasil menduduki Yogyakarta dan kota-kota lain di Jawa dan Sumatera yang masih berada di tangan Republik, selain itu para pemimpin Republik Indonesia termasuk Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Syahrir, H. Agus Salim, dan lain-lain berhasil ditawan dan diasingkan oleh Belanda pada tanggal 24 Desember 1948. (Soejitno Hardjosoediro, 1987: 163).

Serangan militer Belanda tersebut telah menimbulkan gelombang kekecewaan dan kebencian tidak hanya dari masyarakat Indonesia, namun juga dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Namun demikian, bersamaan dengan itu telah terjadi pula beberapa peristiwa politik penting di New Delhi (India) dan di lembaga dunia PBB. Adapun peristiwa yang terjadi di New Delhi adalah spontanitas Perdana Menteri India, Nehru atas saran dari Perdana Menteri Myanmar, U Nu guna mengadakan konferensi khusus negara-negara Asia untuk membicarakan masalah di Negara Republik Indonesia, yang dihadiri oleh 18 negara termasuk Negara Australia dan New Zealand, sedangkan Thailand dan Nepal mengirimkan peninjau, hanya Negara Turki yang saat itu berhalangan hadir. Dalam kesempatan itu Ketua Konferensi, Nehru mengatakan sebagai berikut:

“Di Indonesia telah terjadi agresi yang paling tidak kenal malu, dan kita menyesal bahwa sikap beberapa negara yang ternyata diam-diam menyetujui atau tidak mencela agresi itu dilakukan. Negara Belanda adalah anggota suatu uni negara-negara barat. Apakah kehendak uni ini? Bantuan Marshall bagi Hindia Belanda dihentikan, tetapi negara Belanda masih dibantu. Saya rasa bahwa saya dengan menyatakan demikian, menyatakan pula pendirian semua negara Asia. (A.H. Nasution, 1973: 34)

Sebagai penutup dari acara “Konferensi Asia Untuk Indonesia” itu, maka diusulkan agar Dewan Keamanan PBB bisa memberikan pertanggungjawaban pada sidanganya kelak tanggal 24 April 1949.

Setelah Dewan Keamanan PBB menerima laporan dari KTN mengenai terjadinya peristiwa Agresi Militer Belanda yang ke-2 di Indonesia, maka DK PBB segera mengadakan sidang pada tanggal 20 Desember 1948 di Pads. Selanjutnya

pada tanggal 22 Desember 1948, wakil Belanda di LBB, Dr. J.H. van Roijen memberikan pemaparan mengenai jalannya operasi militer serta motivasi Pemerintah Belanda mengadakan serangan yang kedua kalinya terhadap Negara Republik Indonesia, namun hal itu justru malah menuai rasa tidak simpatik dari sebagian besar anggota yang hadir terhadap pihak Belanda.

Beberapa delegasi yang biasanya senantiasa mendukung Belanda, mulai mengundurkan diri satu persatu, bahkan Prof Phillip C. Jessup sebagai Wakil Negara Amerika Serikat di Dewan Keamanan LBB, secara terang-terangan mengatakan; "Satu kenyataan sederhana tetapi pasti adalah perintah gencatan senjata dari Dewan Keamanan pada tanggal 1 Agustus tidak diindahkan, sehingga aksi militer Belanda adalah pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam LBB". (M. Sabir, 1987: 115)

Dalam sidang lanjutan Sidang Dewan Keamanan LBB pada tanggal 25 Desember 1948, van Roijen menyatakan kesungguhan hati pemerintah Belanda untuk:

- 1) Penyerahan kedaulatan kepada NIS (Negara Indonesia Serikat) dalam tahun 1950.
- 2) Dalam satu bulan mendatang membentuk pemerintahan peralihan di Indonesia.
- 3) Segera setelah Pemerintahan Peralihan RIS (Republik Indonesia Serikat) diresmikan akan dipersiapkan pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota dewan perwakilan rakyat. Dewan tersebut akan disertai tugas untuk menyusun rencana Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat, yang kemudian akan dikirimkan kepada dewan-dewan perwakilan negara bagian untuk mendapat persetujuan.
- 4) Pemerintah peralihan mempersiapkan dan menyusun sistem administrasi negara yang akan didirikan itu.
- 5) Akhirnya mengadakan Konferensi Meja Bundar untuk menentukan hubungan uni Belanda-Indonesia. (Tobing, 1987: 124)

Namun argumentasi yang dikemukakan oleh van Roijen ternyata tidak mampu mempengaruhi pendirian pihak Negara Amerika, Cuba, maupun Norwegia, sebagai negara-negara yang telah mengajukan usul resolusi pada tanggal 21 Januari 1949. Dengan demikian maka keluarnya Resolusi Dewan Keamanan LBB tanggal 28 Januari 1949 yang diambil pada sidang tersebut, merupakan suatu kemenangan diplomatik yang spektakuler bagi Pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa tersebut dapat dinilai sebagai tonggak baru yang sangat prinsipil dalam perkembangan penyelesaian masalah Indonesia selanjutnya. Oleh karena itu penerimaan resolusi tersebut oleh Dewan Keamanan LBB dianggap sebagai suatu peristiwa bersejarah pula khususnya bagi pemerintahan Amerika Serikat melalui wakilnya di Dewan Keamanan LBB, Prof Phillip C. Jessup yang telah mampu memainkan peranannya yang cukup menonjol.

Adapun isi dari Resolusi Dewan Keamanan LBB tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Membebaskan semua tahanan politik.
- 2) Mengembalikan pemerintahan R.I yang dapat berfungsi bebas di Yogyakarta dan sekitarnya.

- 3) Mengadakan pemerintahan federal selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 1949.
- 4) Mengadakan pemilihan umum untuk memilih konstituante yang harus selesai pada tanggal 1 Oktober 1949.
- 5) Pengembalian secara bertahap pemerintah Republik di lain daerah. Inidengan sendirinya penarikan mundur yang bertahap dari pasukan-pasukan Belanda (Hardjosoediro, 1987: 164).

Keluarnya Resolusi Dewan Keamanan LBB tersebut jelas tidak bisa diterima oleh pihak Belanda terutama di kalangan militernya, karena secara tidak langsung pihak Belanda harus mengembalikan Pemerintahan Republik Indonesia di Ibukota Yogyakarta.

Dengan munculnya Resolusi Dewan Keamanan LBB itu, maka pihak Belanda tidak bisa lagi mengembangkan kepiawaiannya dalam berdiplomasi, sehingga persoalan dirasakan menjadi semakin dilematis bagi Pemerintah Belanda. Jika Belanda menerima resolusi berarti harus menghancurkan obsesinya untuk menjadi pemilik yang syah atas Negara Republik Indonesia, namun jika Belanda menolak resolusi maka sama saja dengan menyatakan diri konfrontasi dengan LBB yang secara langsung akan berdampak kerugian besar bagi negeri Belanda sendiri serta lebih terkucilkan lagi di mata dunia internasional.

Akhirnya keputusan Pemerintah Belanda dalam menyikapi Resolusi Dewan Keamanan LBB ini yaitu dengan mengambil jalan untuk menghentikan pertempuran dan menyatakan bersedia melaksanakan seluruh isi dari Resolusi Dewan Keamanan LBB pada tanggal 28 Januari 1949.

Situasi Menjelang Perundingan Roem-Roijen

Komisi Liga Bangsa-Bangsa di Indonesia dengan sangat cermat terus melakukan pemantauan seputar perkembangan politik di tanah air, terutama setelah Beel mengumumkan gagasan Pemerintah Belanda mengenai penyerahan kedaulatan yang dipercepat. Sekaitan dengan hal tersebut, maka pada tanggal 23 Maret 1949 Dewan Keamanan LBB mengeluarkan *ruling* atau semacam keputusan yang berbunyi sebagai berikut:

“Dewan Keamanan berpendapat bahwa UNCI selaras dengan resolusi Dewan Keamanan LBB tanggal 28 Januari 1949 dan tidak merampashak-hak, tuntutan-tuntutan dan kedudukan pihak-pihak harus membantupihak-pihak dalam mencapai persetujuan tentang:

- a. Pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB;
- b. Waktu dan syarat-syarat untuk mengadakan konferensi yang diusulkan di Den Haag, agar perundingan dilakukan selekas-lekasnya” (Agung, 1991: 79)

Komisi Liga Bangsa-Bangsa untuk Indonesia UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*) mendapat mandat dari Dewan Keamanan untuk melaksanakan *ruling* tersebut. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Komisi yakni dengan melakukan pendekatan dengan pihak Belanda melalui Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. J.M.L. Beel dan Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, hingga akhirnya baik pihak Belanda maupun pihak Republik Indonesia bersedia

menerima *ruling* Dewan Keamanan tersebut. Selanjutnya diadakan persiapan, untuk melakukan perundingan sesuai dengan salah satu isi dari *ruling* Dewan Keamanan. Dari pihak Pemerintah Belanda menunjuk Dr. J.H. van Roijen yang saat itu menjabat Kepala Perutusan Pemerintah Belanda di LBB sebagai Ketua Delegasi Belanda dalam perundingan yang akan segera dilaksanakan, sedangkan dari pihak Republik Indonesia menunjuk Mr. Mohammad Roem sebagai Ketua Delegasi RI.

Delegasi Indonesia menuntut agar perundingan-perundingan selanjutnya baru diadakan setelah pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Ibukota Yogyakarta, sebaliknya Pemerintah Belanda juga menghendaki agar terlebih dahulu pihak RI menghentikan perang gerilyanya secara tuntas, sehingga pada awal bulan Mei sudah nampak tanda-tanda bahwa perundingan akan memperoleh kemajuan yang diharapkan.

Tanggal 6 Mei 1949 Ketua Delegasi Republik Indonesia, Mr. Mohammad Roem bertolak ke Bangka untuk berkonsultasi dengan Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta yang tengah berada di pengasingan, Roem berupaya meminta persetujuan kepada kedua pemimpin Republik mengenai naskah pernyataan yang telah disetujui bersama antara Mr. Mohammad Roem dan Dr. J.H. van Roijen, atas bantuan Merle Cochran yang tengah menjalankan tugasnya untuk melaksanakan *ruling* Dewan Keamanan LBB pada tanggal 23 Maret 1949. Adapun Soekarno dan Hatta segera menyetujui rencana naskah pernyataan itu dan Mohammad Roem memperoleh wewenang untuk menandatangani naskah tersebut. Setelah selesai melakukan konsultasi, maka pada hari itu juga Mr. Mohammad Roem kembali ke Jakarta dan esok harinya dilangsungkan penandatanganan naskah pernyataan hasil perundingan itu.

Adapun Perundingan yang ditandatangani oleh Mr. Mohammad Roem dan Dr. J.H. van Roijen pada tanggal 7 Mei 1949, kemudian lebih dikenal dengan nama "Persetujuan Roem-Roijn", dan isi dari persetujuan tersebut sebenarnya lebih merupakan pernyataan kesediaan berdamai antara kedua belah pihak.

Dalam Persetujuan itu, pihak Delegasi Republik Indonesia menyatakan kesediaannya untuk:

- 1) Mengeluarkan perintah kepada "pengikut Republik yang bersenjata" untuk menghentikan perang gerilya.
- 2) Bekerjasama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
- 3) Turut serta dalam KMB di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat (Muljana, 2008: 227).

Sedangkan pihak Delegasi Pemerintah Belanda saat itu menyatakan kesediaannya untuk:

- 1) Menyetujui kembalinya Pemerintahan RI ke Yogyakarta.
- 2) Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.

- 3) Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948, dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik.
- 4) Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari NIS (Negara Indonesia Serikat).
- 5) Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985: 210-211)

Namun demikian hasil Peretujuan Roem-Roijen ini juga mendapat reaksi yang beragam dari berbagai pihak di Indonesia, reaksi yang cukup keras terutama datang dari pihak militer Tentara Republik Indonesia (TRI) dan dari pihak Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Dengan tercapainya persetujuan tentang pengembalian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia atas daerah Yogyakarta, maka persoalan berikut yang harus mendapat perhatian, adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan sebuah pemerintahan nasional yang akan berfungsi sebagai Pemerintahan Sementara sampai terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS).
- 2) Penyerahan kedaulatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, termasuk status Uni-Indonesia, antara lain perjanjian-perjanjian sementara. (Nasution, 1973: 290)

Pada saat itu BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) juga menyatakan pendapatnya bahwa soal pertama secara keseluruhan harus dianggap sebagai masalah bangsa Indonesia saja, oleh sebab itu maka masalah tersebut harus menjadi prioritas untuk dibahas terlebih dahulu dalam suatu Konferensi Inter-Indonesia sebelum persoalan itu dibicarakan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Dengan pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 7 Mei 1949 dalam sebuah rapat yang diadakan oleh BFO, memutuskan:

- 1) Menganggap perlu membicarakan kerangka dasar Tata Negara Indonesia Serikat di antara sesama bangsa Indonesia dalam sebuah Konferensi Inter-Indonesia sebelum KMB.
- 2) Masalah-masalah yang menyangkut penyerahan kedaulatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, termasuk soal status Uni Belanda-Indonesia secara resmi akan dilakukan dalam KMB (Konferensi Meja Bundar) yang akan datang. (Agung, 1991: 84)

Dalam sebuah kesempatan konferensi pers yang digelar pada tanggal 10 Mei 1949, Mr. Mohammad Roem antara lain menyatakan bahwa kedua belah pihak akan mampu meringankan beban, jika mereka mengurangi perhatian pada kalimat-kalimat yang dipakai dalam perjanjian secara harfiah, yang menentukan adalah kemauankeras dan kesungguhan yang jujur untuk mencapai persetujuan yang saling menguntungkan.

Adapun menyoal tentang pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, Mr. Mohammad Roem menyatakan pendapatnya bahwa usaha pengembalian itu sudah dapat dilaksanakan dalam dua minggu mendatang, kemudian mengenai kapan akan dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) Mr. Mohammad Roem menjelaskan bahwa soal waktu belum dapat

dipastikan, karena hal itu baru dapat ditentukan setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta dan setelah dibahas serta diputuskan dalam suatu rapat kabinet.

Ketentuan itu jugaberlaku bagi keterlibatan BFO (*Bijeenkomst Federal Overleg*) dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Konferensi Inter-Indonesia yang disarankan oleh pihak BFO. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa setelah Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Ibukota Yogyakarta maka dengan sendirinya fungsi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) berhenti, Mr. Sjafruddin Prawiranegara akan kembali menduduki jabatannya semula seperti sebelum terjadinya Agresi Militer Belanda ke-2, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan mewakili urusan luar negeri, sedangkan Mr. A.A. Maramis kembali menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri.

Munculnya Berbagai Reaksi Terhadap Persetujuan Roem-Roijen

Setelah ditandatanganinya Persetujuan Roem-Roijen, maka tentunya muncul beragam reaksi, baik yang pro maupun yang kontra dalam menyikapi persetujuan tersebut, baik dari pihak Bangsa Indonesia maupun pihak Belanda sendiri. Reaksi yang cukup keras datang dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda untuk wilayah Indonesia, Dr. L.J.M. Beel, sekalipun dia turut menyetujui persetujuan tersebut, namun sebenarnya Beel menentang Pemerintah Belanda untuk tunduk pada *resolusi* Dewan Keamanan LBB tanggal 23 Maret 1949 sehingga terjadilah perundingan dengan pihak Republik Indonesia.

Beel mencoba membuat manuver politik (*political move*) sedemikian rupa agar menghindarkan Belanda dari Resolusi Dewan Keamanan LBB, dia segera menyampaikan undangan kepada Ir. Soekarno untuk dapat menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, dengan maksud mempercepat penyerahan kedaulatan terhadap Republik Indonesia yang diharapkan akan diikuti oleh para pemimpin Republik dalam kapasitas pribadi mereka masing-masing. Pendirian Beel dilandasi oleh anggapannya bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi setelah diduduki oleh pasukan Belanda.

Undangan Beel tersebut di sambut baik oleh Soekarno dan dia bersedia mengikuti apa yang diinginkan Beel, tetapi dengan mengajukan beberapa syarat, diantaranya bahwa kehadiran dirinya (Soekarno) harus dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan hanya sebagai pemimpin terkemuka belaka. Strategi Beel tersebut ternyata juga mendapat sambutan dikalangan anggota Dewan Keamanan LBB, sehingga atas usul wakil dari Negara Kanada maka Dewan Keamanan LBB segera melayangkan surat kepada Panitia LBB di Indonesia mengenai apa yang dinamakan sebagai "*the sense of the security council*" (pengertian Dewan Keamanan) tentang Resolusi 28 Januari 1949, maksudnya ialah bahwa pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta harus diutamakan, kemudian syarat-syarat ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar juga harus disetujui secepat mungkin. (Roem, 1972: 96-98)

Adapun Beel sendiri yang bersikap menentang keras terhadap penandatanganan Persetujuan Roem-Roijen, maka pada tanggal 9 Mei 1949 dia mengirimkan surat keputusan kepada Ratu Belanda, Juliana memohon

agardibebastugaskan dari jabatannya sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia. Dalam hubungan dengan hal itu, Mohammad Hatta dalam salah satu memoarnya menulisebagai berikut:

“Kami di Manumbing mendengar berita radio yang mengatakan bahwa Beel minta berhenti sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda karena tidak mau bertanggungjawab tentang akibat persetujuan Roem-Roijen. Beel terpaksa minta berhenti karena pendiriannya sebagai berikut:

- 1) Republik Indonesia tidak kembali ke Yogyakarta
- 2) KMB diteruskan juga dengan tidak ada RI
- 3) Tentara Belanda jangan ditarik kembali dari Yogyakarta” (Hatta, 1979: 522)

Pada awal bulan Juni 1949, Beel akhirnya meninggalkan Jakarta bertolak menuju ke negeri Belanda, adapun pengganti Beel sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, maka Pemerintah Belanda menunjuk Dr. A.H. Lovink, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Belanda terhitung mulai tanggal 19 Mei 1949. Dengan demikian berakhirlah peranan Beel, seorang arsitek dua kali agresi militer di Indonesia.

Selain itu dengan tercapainya Persetujuan Roem-Roijen, maka pada prinsipnya adalah kekalahan telak yang harus diterima oleh pihak Belanda, segala usaha yang mereka lakukan untuk meniadakan keberadaan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara Bangsa, sekaligus usaha untuk menghancurkan Tentara Republik Indonesia (TRI), pupus sudah. Pemerintahan Negara Republik Indonesia akan segera pulih dan kembali ke Ibukota Yogyakarta, TRI masih tetap eksis bahkan diinstruksikan untuk mengambil alih tugas-tugas pertahanan dan keamanan di daerah Yogyakarta dari tentara Belanda, kantong-kantong Republik yang tersebar di berbagai daerah Federal juga diakui sebagai wilayah Republik, dan BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) pada intinya tetap mengakui pula batas-batas wilayah Republik menurut hasil “Perjanjian Renville”.

Berbagai kondisi akibat berlangsungnya Perundingan Roem-Roijen pada akhirnya menjadikan tugas para menteri dalam Kabinet Pemerintahan Belanda semakin berat, terutama dalam sidang-sidang di parlemen (*Staten General*) guna mendapatkan persetujuan dari para anggota wakil rakyat. Selain itu di kalangan militer Belanda juga mengalami kegoncangan, pers setempat menyatakan bahwa Jenderal Meiyer dan Kolonel van Langen meminta berhenti dari jabatannya, kemudian pada tanggal 25 Mei 1949 Jenderal Spoordiberitakan telah meninggal akibat serangan jantung yang diderita sejak tanggal 23 Mei 1949. Hal itu dapat dipahami karena begitu beratnya beban moral tentara Belanda untuk melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya mengenai hasil dari Persetujuan Roem-Roijen.

Sementara itu situasi dan kondisi yang bermuara pada keresahan publik di tanah air juga cukup hebat dalam menyikapi hasil persetujuan itu, baik di kalangan politisi maupun militer. Di Jakarta, Mohammad Natsir dan Masyumi sudah terlebih dahulu mengundurkan diri dari kapasitasnya sebagai seorang delegasi karena tidak menyetujui sejak terjadinya proses perundingan, kemudian di kalangan militer (gerilyawan) juga secara umum tidak setuju terhadap hasil

Persetujuan Roem-Roijen, mereka menganggap bahwa penerimaan hasil persetujuan tersebut sebagai suatu kekalahan perang belaka.

Sikap TRI Pasca Persetujuan Roem-Roijen

Sebagaimana di ulas sebelumnya bahwa hasil Persetujuan Roem-Roijen tersebut langsung menuai reaksi keras terutama dari kalangan TRI dan PDRI, hal itu sebagaimana diungkap bahwa Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (PB-APRI) Jenderal Soedirman pada tanggal 1 Mei 1949 telah mengeluarkan amanat yang ditujukan kepada para komandan kesatuan, yang memperingatkan agar mereka tidak turut serta memikirkan hasil Persetujuan Roem-Roijen, karena akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan.

Amanat Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soedirman tersebut, kemudian diteruskan oleh Panglima Tentara dan Territorium Djawa, Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 5 Mei 1949. Pernyataan tersebut mengetengahkan bahwa perundingan yang dilaksanakan hanyalah sebagai strategi perjuangan, dan diperingatkan kepada semua komandan agar membedakan antara gencatan senjata untuk kepentingan politik dan gencatan senjata untuk kepentingan militer. Secara singkat bahwa di kalangan Angkatan Perang R.I. tidak begitu mempercayai keberhasilan perundingan, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya saat dicapai hasil Perundingan Linggarjati. Perjanjian Renville, dan lain-lain, dengan pihak Belanda, pada gilirannya selalu berakhir merugikan perjuangan.

Panglima Besar Angkatan Perang R.I., Jenderal Soedirman pada prinsipnya tidak dapat menerimanya gencatan senjata secara lokal, mengingat pengalaman sebelumnya bahwa hal itu hanyalah sebagai strategi Belanda untuk melakukan konsolidasi, sekaligus memperkuat kedudukannya kembali di front kedudukan TRI yang mereka anggap cukup kuat, namun apabila pasukan TRI di medan tempur tersebut sudah dapat dipukul mundur, maka gencatan senjata (*ceasefire*) lokal akan segera dilanggarnya. Demikian pula Jenderal Soedirman tidak begitu yakin dengan niat baik pihak Belanda dalam Perundingan Roem-Roijen itu, Soedirman menganggap tidak syah sebelum disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang secara yuridis formal telah memegang kekuasaan pemerintahan R.I. sejak tanggal 19 Desember 1948. Demikian isi korespondensi antara Panglima Jenderal Angkatan Perang R.I. Jenderal Soedirman dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX terhadap penandatanganan Persetujuan Roem-Roijen. Amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman itu kemudian disusul dengan Maklumat Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang meyerukan agar tetap waspada, walaupun ada perundingan-perundingan yang menghasilkan persetujuan.

Sekaitan dengan hal tersebut, Mr. Syafruddin Prawiranegara selaku pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“PDRI tidak akan menentukan sikap terhadap Persetujuan Roem-Roijen. PDRI menyerahkan putusan mengenai persetujuan itu kepada kabinet, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan

Pemimpin Angkatan Perang. Akibat-akibat dariputusan yang akan diambil itu akan dipikul bersama”(Roem, 1972: 109)

Adapun prediksi pihak TRI mengenai kemungkinan akan terjadinya serangan kembali dari pihak militer Belanda ke wilayah Republik, ternyata tidak meleset. Pasukan Belanda yang ditarik dari Ibukota Yogyakarta kemudian dipindahkan ke Surakarta, sehingga dengan bertambahnya kekuatan Belanda di Surakarta, maka Letnan Kolonel Slamet Riyadi sebagai pemimpin T.R.I. di Surakarta segera memerintahkan penyerangan-penyerangan terhadap beberapa obyek vital di Solo. Hal serupa juga berlaku di kantong-kantong T.R.I. lainnya dimana perlawanan gerilya tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh hasil-hasil perundingan.

Menyikapi amanat langsung dari elite pimpinan T.R.I. tersebut, maka secara otomatis organ-organ militer di bawahnya juga segera melaksanakan perintah itu, misalnya; Divisi III di Jawa Tengah, yang terhitung cepat dalam menyusun sistem pertahanannya dengan membagi ke dalam tiga wilayah pertahanan yang disebut Wehrkreise, yakni; 1). Wehrkreise I, dipimpin oleh Letnan Kolonel Mohammad Bakhrun yang menempati pos di daerah selatan Purbalingga. 2). Wehrkreise II, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini bermarkas di sebelah utara Purworejo. 3). Wehrkreise III, di pimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto yang menempati pos di wilayah Pegunungan Menoreh.

Namun karena materi yang tengah dibahas lebih menyangkut pada persoalan Persetujuan Roem-Roijen, maka yang akan mendapat perhatian dalam tulisan ini adalah sekilas mengenai gerakan pasukan T.R.I. Wehrkreise III yang menempati pos di seputar Pegunungan Menoreh dengan medan gerilya mencakup wilayah Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibukota pemerintahan Republik Indonesia.

Salah satu akibat langsung dari dikuasainya Yogyakarta sebagai Ibukota RI oleh pasukan Belanda dalam gerakan agresi militernya yang ke-2, yaitu bahwa masyarakat Yogyakarta seolah-olah kehilangan semangat lagi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, namun semangat kebangsaan itu tiba-tiba muncul kembali bersamaan dengan hadirnya pasukan gerilya Tentara Republik Indonesia (TRI) dari kesatuan Wehrkreise III, yang berhasil menduduki kembali ibukota pemerintahan RI, Yogyakarta, sekalipun hanya dalam waktu beberapa jam saja.

Keberhasilan pasukan T.R.I. menduduki Ibukota Yogyakarta sekalipun hanya dalam tempo yang singkat, tidak terlepas dari peran strategis Sri Sultan Hamengkubuwono ke-IX yang terus memantau situasi perkembangan Negara Republik Indonesia di mata dunia internasional melalui siaran radio BBC London, Inggris. Sultan saat itu berpendapat bahwa untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Negara Republik Indonesia masih ada, maka harus dilakukan penguasaan kembali ibukota Republik oleh Tentara Republik Indonesia, sekalipun hanya dalam beberapa waktu saja. Selanjutnya Sultan menyampaikan gagasan tersebut kepada Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (PB-APRI) Jenderal Soedirman, dan langsung ditindaklanjuti dengan memberikan perintah kepada Komandan Kesatuan Wehrkreise III, Letnan Kolonel Soeharto yang bermarkas di puncak bukit Menoreh.

Disamping itu beberapa rencana melalui strategi perang gerilya juga dilakukan dengan cukup matang sebelum serangan dimulai, adapun beberapa rencana tersebut diantaranya adalah:

1. Mengadakan serangan malam
2. Menghancurkan kekuatan musuh sebanyak-banyaknya
3. Merampas senjata musuh sebanyak-banyaknya
4. Membumihanguskan tempat yang dianggap penting

Tepat pada pukul 16.00 WIB tanggal 10 Maret 1949, semua pasukan gerilya dari Kesatuan Wehrkreise III dinyatakan sudah siap tempur dengan persenjataan seadanya, kemudian mereka mulai bergerak menuju basis-basis penyerbuan setiap kompi yang telah ditentukan, dengan target sasaran pendudukan kembali Ibukota RI, Yogyakarta. Kurang lebih pukul 19.00 (malam) mereka semua telah *standby* di pangkalan serangannya masing-masing, hingga pada gilirannya serangan dilakukan serentak dari segala arah.

Pada pukul 21.00 tembakan pertama dimulai ketika pasukan gerilya sudah berhasil bergerak menembus tapal batas wilayah kota Yogyakarta, sehingga dengan cepat mereka segera menduduki lokasi di sekitar Kantor Pos, Secodiningratan, Ngabehian, Pathuk, Pakuningratan, Sentul, dan Pogok. Sementara itu tembakan balasan dari tentara Belanda juga cukup gencar karena mereka menganggap bahwa pos-pos pasukannya yang ada di perbatasan kota tengah diserang musuh, dan mereka sedang berharap mendapat bantuan dari tentara Belanda lainnya yang berpangkalan di dalam kota. Namun mereka terkecoh karena pada saat keluar dari tangsi-tangsinya, justru mereka disambut oleh pasukan gerilya T.R.I. yang sudah berhasil memasuki kota dan menunggu mereka keluar, sehingga terjadilah tembakan menembak diantara ke dua belah pihak. Sekalipun peperangan demikian sengit, tetapi posisi yang lebih menguntungkan saat itu berada di pihak T.R.I., karena mereka telah mengepung semua markaspasukan Belanda dari semua arah, dan tinggal satu langkah lagi, yakni menyerbu masuk ke dalam tangsi miiter Belanda guna merampas persenjataan yang ada, dan pada akhirnya berhasil.

Pertempuran tersebut terus berlangsung hingga pukul 04.00 dini hari, dan sesuai dengan rencana semula maka mereka segera bergegas untuk kembali menghilang meninggalkan kota menuju basisnya masing-masing. Dalam serangan kilat semalam tersebut, pihak tentara Belanda mengalami kekalahan telak dan banyak menelan korban jiwa, namun sesuai dengan rencana semula bahwa pihak TRI tidak akan terus menduduki kota, tetapi sengaja hanya membuat sebuah efek kejut bagi dunia internasional sebagai peringatan dan tanda bahwa Republik Indonesia masih tetap ada.

Pada pagi hari tanggal 11 Maret 1949, pos-pos tentara Belanda yang berada di perbatasan kota telah ditembaki, dan tepat pada pukul 6 pagi berbagai tempat di ibukota Yogyakarta telah terjadi penembakan secara sporadis. Pasukan Belanda cukup repot dalam menghadapi serangan gerilya T.R.I. tersebut. Sebuah Kolone Senapan Belanda yang dihadapkan pada gerilyawan T.R.I. yang menyerang dari arah selatan kota Yogyakarta, terancam karena mendapat tembakan yang hebat dari bagian luar Keraton Ngayogyakartaadiningrat, namun setelah Kolone itu berhasil mencapai tembok utara keraton dalam, mereka masih

juga dihujani tembakan dari dalam keraton, karena para sniper T.R.I. bersembunyi di pohon-pohon yang berada di keraton dalam. Oleh karena itu Komandan Kolone segera meminta izin memasuki keraton, dan permintaan itu segera dikabulkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-IX, namun setelah Sultan menerangkan bahwa di halaman keraton tidak ada gerilyawan penyerang, maka pasukan Belanda memutuskan untuk tidak diadakan penyelidikan lebih lanjut ke keraton dalam.

Sementara itu pada saat pasukan TRI kembali ke posnya masing-masing setelah berhasil mengejutkan Belanda di Yogyakarta, sekelompok pasukan gerilya dari Sektor Selatan yang baru mencapai kurang lebih 1 km perjalanan dari perbatasan kota, dengan tidak disengaja tiba-tiba mereka bertemu dengan sekelompok pasukan Belanda yang juga baru saja pulang melakukan serangannya (*owneg*) dari Bantul. Saat itu mereka juga tengah menempuh perjalanan pulang menuju posnya di kota Yogyakarta, sehingga pertempuran hebat tidak terelakkan yang berlangsung hingga pukul 13.00 siang hari, namun bantuan pasukan Belanda dari kota segera datang dengan beberapa pesawat terbangnya, sehingga pasukan gerilya terpecah guna menghindarkan diri dari pemboman tersebut, mereka terpecah menjadi kelompok kecil dan bergegas kembali menuju ke tempat-tempat yang telah ditentukan.

Adapun salah satu dampak dari terjadinya serangan gerilya tersebut, maka pihak militer Belanda setiap hari terus melakukan “pembersihan” sehingga sangat berat beban yang dirasakan oleh rakyat pada waktu itu. Menyikapi situasi tersebut, kaum gerilyawan segera menerapkan strategi bumi hangus untuk memperlambat laju patroli tentara Belanda, gudang persenjataan Tugu dibakar, jembatan Patangpuluhan diledakan, pabrik gula Sorogedug dan Padokan dihancurkan. Selanjutnya pasukan Belanda kembali melakukan penyisiran yang diarahkan ke daerah Padokan di sekitar Bantul-Imogiri, dalam aksinya itu telah menelan 16 orang korban jiwa dari pihak gerilyawan. Dua hari kemudian patroli pasukan Belanda yang berkekuatan lebih besar lagi bergerak dari arah Maguwo melalui Bawuran menuju Imogiri, dan pada keesokan harinya tentara Belanda menyerang Imogiri dari arah utara dengan menggunakan lima pesawat tempur, hingga terjadilah baku tembak dan menelan tiga orang korban dari pihak TRI.

Disamping itu Kotagede di sebelah tenggara Ibukota Yogyakarta ditengarai oleh pihak Belanda sebagai sarang gerilyawan yang cukup kuat, sehingga patroli pasukan Belanda selama kurang lebih delapan jam terus melakukan penyitaan barang-barang serta pembakaran rumah-rumah penduduk. Dalam aksinya tersebut telah jatuh dua orang korban dari pihak gerilya dan 23 orang rakyat sipil.

Pada tanggal 8 April 1949, patroli pasukan Belanda yang berkekuatan 1 Peleton di Desa Jonggalan dan Klemisan dihadang dan dikepung oleh pasukan gerilyawan T.R.I., dalam pertempuran sengit tersebut tentara gerilya hampir kehabisan peluru hingga bersiap-siap untuk melakukan perlawanan fisik dengan tangan kosong, namun kemudian datang bantuan Belanda sebanyak 18 truck pasukan. Dengan kehadiran bantuan pasukan tersebut maka pos-pos persembunyian tentara gerilyawan segera dihujani mortir dan terjadilah pertempuran jarak dekat, sehingga akhirnya gerilyawan mundur karena tidak seimbang untuk melawan pasukan yang lebih besar.

Meskipun terkesan sama seperti di daerah lain yang melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda secara bergerilya, namun sesungguhnya bumi hangus di wilayah Kota Solo jauh lebih hebat dibanding dengan yang dilakukan di ibukota Yogyakarta karena lebih lama waktu pelaksanaannya, sedangkan di daerah ibukota Yogyakarta sangat kompleks berhubung banyaknya instansi-instansi pusat.

Salah satu serangan hebat terhadap Kota Solo adalah serangan yang dilancarkan oleh para Tentara Pelajar pada tanggal 16-17 Maret 1949, beberapa kelompok gerilyawan sekitar pukul 07.00 melakukan serangan terhadap Markas Polisi di Panalaran, Tangsi Altileri di Tipes, Asrama Polisi (Seksi Polisi I) di Baron, Kantor Military Police (MP) di Mangunjayan, Pos Militer Bagian LTD di Sriwedari, dan Stasiun Balapan.

Demikian bahwa serangan umum para gerilyawan Tentara Republik Indonesia (TRI) selama 6 jam ke Ibukota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, jika dilihat dari sudut pandang operasi militer secara menyeluruh, memang tidak begitu signifikan dibanding dengan jumlah kerugian di kedua belah pihak. Namun jika dilihat dari sudut pandang politis dan psikologis, jelas bahwa hal itu tidak bisa dilihat dengan sebelah mata, karena dengan peristiwa itu secara tidak langsung telah memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Negara Republik Indonesia masih tetap ada.

Perang gerilya di Ibukota Yogyakarta maupun di kota-kota lainnya terus berkobar dari hari ke hari dan semakin memuncak menjelang tercapainya Persetujuan Roem-Roijen, hal itu membuktikan kesanggupan dan kesungguhan rakyat dan Tentara Republik Indonesia untuk melakukan perlawanan sampai kapanpun waktunya.

Situasi Politik R.I. Setelah Persetujuan Roem-Roijen

Pada tanggal 7 Mei 1949, telah disepakati bahwa Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta akan segera memerintahkan pasukan Tentara Republik Indonesia (TRI) untuk melakukan gencatan senjata sekembalinya mereka ke Ibukota Yogyakarta, disamping itu juga ada klausul yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Belanda akan menerima pihak Negara Republik Indonesia pada Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan segera digelar, serta bahwa mereka tidak akan mendirikan negara-negara federal yang baru.

Sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Roem-Roijen tersebut, maka pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara pihak Republik Indonesia, pihak BFO, dan pihak Pemerintah Belanda di bawah pengawasan Komisi Liga Bangsa-Bangsa, yang dipimpin oleh Mr. Critchley dari Negara Australia. Adapun hasil perundingan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. Keresidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda pada tanggal 1 Juli 1949 dan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TRI menguasai keadaan sepenuhnya daerah itu
- b) Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta

c) Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag

Setelah para pemimpin Republik Indonesia berkumpul kembali di Ibukota Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 tepatnya pukul 20.30, diadakan Sidang Kabinet yang pertama, dalam kesempatan itu Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta. Selain itu dalam Sidang Kabinet tersebut diputuskan pula pengangkatan Sri Sultan Hamengkubowono ke-IX sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan Negara.

Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Ibukota Yogyakarta, yang sudah ditinggalkan oleh pasukan-pasukan Belanda pada akhir bulan Juni 1949. Namun demikian Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (PB-APRI), Jenderal Soedirman dan para pimpinan tentara lainnya enggan mengakui kekuasaan sipil yang mereka anggap telah meninggalkan Republik, tetapi pada akhirnya pihak militer mau mengakuinya ketika Soekarno mengancam bahwa dirinya akan mengundurkan diri jika mereka tidak melakukannya.

Selanjutnya sebuah konferensi politik dalam negeri diselenggarakan di Yogyakarta dan di Jakarta pada bulan Juli 1949, dalam konferensi itu negara-negara federal ternyata mempunyai banyak kepentingan yang sama dengan pihak Republik, sebagian besar dikarenakan rasa hormat mereka atas perlawanan Republik dan kekecewaan mereka atas kelalaian Pemerintah Belanda untuk menyerahkan kekuasaan yang penting kepada mereka. Konferensi tersebut bersepakat bahwa Tentara Republik Indonesia akan menjadi inti kekuatan militer bagi Negara Republik Indonesia Serikat yang baru dan bahwa Ir. Soekarno serta Drs. Mohammad Hatta akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden negara itu.

Sementara itu bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Inter-Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1949, di Jakarta juga diadakan perundingan resmi antara wakil-wakil pemerintah R.I. yang tergabung dalam BFO, dengan pihak Belanda di bawah pengawasan UNCI yang menghasilkan kesepakatan mengenai Persetujuan Penghentian Permusuhan. Tindak lanjut dari hal tersebut maka pada tanggal 3 Agustus 1949 diumumkan pula genjatan senjata yang akan mulai diberlakukan di seluruh wilayah Pulau Jawa pada tanggal 11 Agustus 1948 dan di Pulau Sumatera pada pada tanggal 15 Agustus 1949. Namun sebelum genjatan senjata dilaksanakan, pasukan Tentara Republik Indonesia (TRI) telah berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Surakarta dan mempertahankannya selama dua hari. Selanjutnya bentrokan-bentrokan yang berdiri sendiri berlanjut terus sampai bulan Oktober 1949.

Pengumuman perintah penghentian tembak menembak tersebut dilakukan oleh Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (Pangti APRI) melalui Radio Republik Indonesia (RRI) di Yogyakarta, kemudian hal itu dilakukan pula oleh Jenderal Soedirman selaku Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (PB-APRI). Selanjutnya pada hari yang sama, A.H.J Lovink selaku Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda sekaligus sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia, memerintahkan pula kepada para prajuritnya untuk meletakkan senjata. Hal itu artinya bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk menghentikan permusuhan

secara resmi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) dari badan dunia Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

Sedikit demi sedikit akhirnya penyerahan kekuasaan militer yang terintegrasi bagi Republik Indonesia Serikat diurus oleh Sri Sultan Hamengkubawana ke-IX selaku Koordinator Keamanan, namun masih ada beberapa wilayah yang bergolak seperti halnya di Sulawesi Selatan, Sumatera Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat, dimana dalam proses penyelesaiannya, pihak TRI justru malah menghadapi perlawanan dari pasukan-pasukan sparatis loka setempat.

Sementara itu dengan telah disepakatinya prinsip-prinsip Persetujuan Roem-Roijen tersebut, maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera memerintahkan kepada Sri Sultan Hamengkubowono ke-IX untuk mengambil alih Pemerintahan Republik Indonesia di Ibukota Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari kota tersebut. Sedangkan partai politik yang pertama kali menyatakan setuju dan menerima baik tercapainya Persetujuan Roem-Roijen adalah Partai Masyumi di bawah pimpinan Ketua Umum dr. Sukiman, dia menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh Delegasi R.I. adalah dengan melihat posisi R.I. di dunia internasional dan di dalam negeri sendiri, apalagi dengan adanya sikap BFO yang semakin menyatakan hasratnya untuk bekerjasama pihak dengan pihak R.I. Selain itu Mr. Surjono Hadinoto, salah seorang Ketua dari Partai Nasional Indonesia (PNI) juga menyatakan bahwa Persetujuan Roem-Roijen merupakan satu langkah ke arah tercapainya penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian maka akhirnya kedua partai tersebut mengeluarkan pernyataan bersama bahwa Persetujuan Roem-Roijen sekalipun masih kurang memuaskan, namun sudah bergerak beberapa langkah ke arah penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda.

Tentara Belanda Mundur dari Yogyakarta

Kontak dan komunikasi politik yang dibangun antara para pemimpin pasukan Republik Indonesia yang tengah melakukan perang gerilyadengan para pemmpiin R.I. yang tengah ditawan pasukan Belandadi Pangkalpinang Bangka, pada akhirnya mampu menghasilkan suatu pengesyahan mandat yang diberikanoleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono ke-IX di Ibukota Yogyakarta, dan setelah itu maka Sri Sultansegera berusaha untuk membentuk Staf Angkatan Perang yang dipercayakan kepada Kolonel Djatikoesoemo.

Sementara itu setelah adanya kesepakatan penghentian tembak menembak dari kedua belah pihak yang bertikai atas bantuan pihak LBB,maka tepat pada hari H tanggal 10 Mei 1949, Komandan Tentara Kerajaan Belanda segera memerintahkan kepada seluruh pasukannya yang beradadi Keresidenan Yogyakarta agar menghindarkan diri dari pertempuran denganpasukan Republik Indonesia. Demikian pula Menteri Negara Bidang Keamanan,Sri Sultan Hamengku Buwono ke-IX memerintahkan kepada seluruh pasukan Tentara Republik Indonesia (TRI) yangjuga tengah berada di wilayah Keresidenan Yogyakarta untuk menghindari pertempurandengan pihak Belanda. Perintah tersebut kemudian diulanginya lagi pada tanggal 23 Mei1949. Selanjutnya kepada

Kolonel van Langen, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-IX menyatakan sikap Pemerintah Republik Indonesia bahwa selama penarikan mundur pasukan Belanda nanti, dia menjamin sepenuhnya tidak akan ada gangguan yang dilancarkan oleh pihak Tentara Republik Indonesia.

Setelah menunggu beberapa hari lamanya, akhirnya disepakati bahwa penarikan mundur pasukan Belanda akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 1949, dan kabar itu baru disampaikan oleh pihak Belanda pada tanggal 22 Juni 1949 melalui Panitia Militer LBB. Rencana penarikan mundur pasukan Belanda akan dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 1949 mulai pukul 21.30 malam, selanjutnya penarikan mundur pasukan Belanda berikutnya dari dalam kota akan berlangsung tanggal 29 Juni 1949 yang diatur dalam empat tahap, mulai dari selatan ke utara dan kemudian keluar dari dalam kota menuju Kota Malang.

Namun demikian pada pelaksanaan penarikan mundur pasukan Belanda tersebut, hampir saja terjadi suatu insiden akibat kekhawatiran yang berlebihan akan terjadinya gangguan dari pihak TRI kepada pasukan Belanda, sehingga dua hari sebelum tanggal 29 Juni 1949 pihak Belanda terlebih dahulu telah mengeluarkan pengumuman kepada seluruh penduduk kota mengenai larangan untuk bepergian ke luar rumah, namun pengumuman itu tentunya tidak bisa diterima oleh pihak Republik, dan akhirnya demi menjaga kondusifitas warga Yogyakarta, maka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-IX turut menyampaikan Maklumat Belanda itu kepada seluruh penduduk Yogyakarta. Dengan demikian setelah seluruh kekuatan tentara Belanda meninggalkan Ibukota Yogyakarta, maka penduduk Yogyakarta bisa keluar untuk menyambut kedatangan kembali keluarga mereka yang ikut serta dalam perang gerilya.

Pemerintahan R.I. Kembali ke Ibukota Yogyakarta

Setelah pasukan Belanda meninggalkan Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949, maka tugas pengamanan Ibukota R.I. Yogyakarta sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab langsung Tentara Republik Indonesia (TRI). Dengan keamanan yang semakin kondusif serta kewaspadaan T.R.I. beserta para pejuang lainnya yang tetap tinggi, maka persiapan untuk menerima kedatangan kembali para pemimpin Republik Indonesia dari pengasingan semakin sempurna, hingga pada gilirannya tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, beserta para pejabat tinggi R.I. lainnya tiba di Ibukota R.I. Yogyakarta dari Pangkalpinang, Pulau Bangka.

Kedatangan presiden disambut antusias warga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya mulai dari lapangan terbang Maguwo hingga ke Istana Negara, jalan-jalan yang akan dilalui rombongan presiden ber jam-jam sebelumnya telah penuh sesak oleh warga yang secara histeris menyambut kehadiran mereka, bahkan tidak hanya di jalan raya, namun juga sampai di atap-atap genting rumah penduduk maupun di atas pohon-pohon sepanjang jalan tersebut, mereka riuh rendah menantikan presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi negara lainnya yang mereka cintai.

Sementara itu pimpinan dan para pejabat tinggi PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) pun sebenarnya telah dihubungi oleh tim yang beranggotakan Dr. J. Leimena, Moh. Natsir, dan Dr. A. Halim, akan tetapi

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa para pemimpin PDRI tersebut kurang *respect* terhadap usaha-usaha perundingan dengan pihak Belanda yang tidak mengikutsertakan mereka (PDRI). Namun akhirnya dengan penjelasan-penjelasan cukup bijaksana yang disampaikan oleh tim (Dr. J. Leimena dkk) maka para pejabat PDRI tersebut dapat mengerti dan menerimanya, sehingga mereka segera bergegas untuk mempersiapkan diri berangkat ke Ibukota Yogyakarta.

Dalam kesempatan tersebut tinggal satu-satunya pemimpin perang gerilya yang belum kembali ke Ibukota Yogyakarta, yakni Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (PB-APRI) Jenderal Soedirman, karena seperti halnya sikap para pejabat PDRI di Sumatera, maka dari awal Jenderal Soedirman juga tidak setuju dengan adanya kebijakan pelaksanaan perundingan dengan pihak Belanda yang ditempuh oleh para pemimpin yang tengah berada dalam status tawanan Belanda di Pangkalpinang, Bangka. Namun setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa kesatuan dan persatuan di antara seluruh pemimpin R.I. pada saat itu harus lebih diutamakan dan sangat dipertaruhkan untuk kelangsungan kemerdekaan Republik Indonesia, maka Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (PB-APRI), Jenderal Soedirman dengan legawa akhirnya memutuskan untuk bersedia kembali ke Ibukota Yogyakarta.

Akhirnya segala persiapan untuk menyambut kedatangan Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (PB-APRI), Jenderal Soedirman yang tengah menempuh perjalanan menuju Ibukota Yogyakarta segera dimulai. Jenderal Soedirman diperkirakan akan tiba di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949, dan akan disambut dengan apel besar Tentara Republik Indonesia (TRI) dari Brigade 10 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Dengan kedatangan Panglima Besar tersebut tersebut, maka lengkap sudah para pimpinan R.I. berkumpul kembali di Ibukota Yogyakarta, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan kembali untuk menghadapi berbagai momentum penting lainnya dalam memulihkan segala aspek kehidupan bangsa yang harus ditangani dengan secepatnya dan penuh seksama.

Adapun *moment* penting pertama pada waktu itu adalah penyerahan kembali mandat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) kepada Presiden Republik Indonesia, yang terjadi pada tanggal 13 Juli 1949. Begitu pula momentum lainnya adalah memaksimalkan rasa tali persaudaraan yang hangat dan simpatik di antara sebagian besar pemimpin BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) terhadap kepemimpinan serta perjuangan pihak R.I. pada saat melakukan perlawanan dengan pihak Belanda.

Rasa persaudaraan dan simpatik tersebut sebenarnya sudah mulai tumbuh sejak pertemuan-pertemuan mereka di Pangkalpinang Bangka, dan didukung pula oleh keberhasilan pihak Tentara Republik Indonesia (TRI) yang telah berhasil mendekatkan para pemimpin R.I., oleh karena itu maka kembalinya pemimpin-pemimpin RI ke Ibukota Yogyakarta juga disertai dengan kedatangan para pemimpin BFO. Selanjutnya kedua kelompok pemimpin tersebut akhirnya bersepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Inter-Indonesia sebagai bekal persiapan untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan diadakan kelak di Den Haag, Belanda.

Tujuan utama diselenggarakannya Konferensi Inter-Indonesia adalah untuk menyatukan pandangan Bangsa Indonesia secara keseluruhan mengenai kemerdekaan yang telah diraihinya untuk masayang akan datang. Konferensi ini berlangsung dalam dua kali babak persidangan, sidang yang pertama dimulai tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta, dan sidang babak kedua berlangsung tanggal 31 Juli 1949 sampaidengan tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta. Adapun keputusan-keputusan penting dalam konferensi tersebut diantaranya adalah:

- 1) Negara Indonesia Serikat akan diberi nama RIS
- 2) Bendera Kebangsaan ditetapkan: Sang Merah Putih
- 3) Bahasa nasional: Bahasa Indonesia
- 4) Hari kebangsaan: 17 Agustus (Hari ProklamasiRI)
- 5) Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat adalah Angkatan PerangNasional. Dalam pembentukan APRIS (Angkatan Perang RepublikIndonesia Serikat), maka TNI harus menjadi intinya. (Disjarahad, 1972: 146).

Melalui keputusan-keputusan tersebut maka sejak saat itu identitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) jelas diakui sebagai inti dari Angkatan Perang Bangsa Indonesia. Hal ini jauh sekali berbeda dengan apa yang dicapai dalam Persetujuan Roem-Roijen yang menyebutkan bahwa Tentara Republik Indonesia (TRI) hanya sebagai “pengikut Republik yang bersenjata”.

Setelah tercapainya kesepakatan dalam Konferensi Inter-Indonesia tersebut, maka Delegasi Republik dan Delegasi BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) berangkat ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, dengan harapan bahwa nantinya KMB akan membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung pada tahun 1950 di Den Haag Belanda, dan sebagaimana diketahui bahwa hasil dari konferensi tersebut merupakan titik akhir perjalanan penjajahan Belanda di tanah air yang telah berlangsung kurang lebih hampir 350 tahun lamanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bagaimanapun juga bahwa terjadinya peristiwa kesepakatan penandatanganan Persetujuan Roem-Roijen pada tanggal 7 Mei 1949, memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dalam catatan perkembangan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, khususnya pada periode perjuangan mempertahankan kemerdekaan, antara tahun 1945-1950. Hal itu berlangsung setelah dilancarkannya Agresi Militer Belanda ke-2 terhadap wilayah Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 1948.

Untuk memahami proses Perundingan Roem-Roijen tersebut seyogyanya diketahui dahulu gagasan awal dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. J.M.L. Beel yang mendapat dukungan Pemerintah Belanda, yang intinya dia mencoba menggambarkan bahwa dengan dilancarkannya Agresi Militer Belanda ke-2 ke wilayah R.I. tersebut, maka pihak Republik Indonesia dianggap sudah tidak ada lagi, dan berdasarkan pandangan ini maka disarankan untuk membentuk pemerintahan federal sementara, tanpa menyertakan Pemerintahan Republik Indonesia.

Namun demikian prakarsa Beel itu kandas oleh sikap tegas dari pertemuan Musyawarah Federal (BFO) yang menentang keras terhadap gagasan Beel tersebut. Selanjutnya wakil pemerintah Amerika Serikat Prof. Phillip C. Jessup mensponsori suatu resolusi LBB yang didukung oleh pemerintah Negara Cuba, dan Norwegia, yang antara lain menuntut dibebaskannya semua pemimpin-pemimpin Republik Indonesia tanpa syarat serta mengembalikan mereka ke Ibukota Negara Republik Indonesia, Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan lagi tugas dan wewenang pemerintahannya seperti semula.

Rencana resolusi tersebut diterima oleh Dewan Keamanan LBB pada tanggal 28 Januari 1949 dan ditegaskan lagi oleh *ruling* Dewan Keamanan LBB pada tanggal 23 Maret 1949 yang mengisyaratkan agar segera dilaksanakan perundingan. Perkembangan politik inilah yang menjadi sebab dan faktor pendorong dilangsungkannya perundingan antara Mr. Mohammad Roem sebagai wakil pihak Republik Indonesia dan Dr. J.H. van Roijen sebagai wakil dari Pemerintah Belanda, yang berlangsung dalam pertemuan pada tanggal 7 Mei 1949, sehingga menghasilkan sebuah Persetujuan Roem-Roijen.

Pada awalnya Persetujuan Roem-Roijen tersebut ternyata tidak dapat diterima begitu saja oleh sebagian besar kalangan politisi maupun petinggi militer dari kedua belah pihak (Republik Indonesia dan Belanda), keduanya sama-sama berasumsi bahwa jika menerima hasil Perundingan Roem-Roijen berarti menerima suatu kekalahan. Namun demikian, akhirnya baik pemerintah Belanda maupun pihak R.I. mau menerima hasil persetujuan tersebut. Adapun inti dari Persetujuan Roem-Roijen adalah pelaksanaan gencatan senjata dan pengembalian Pemerintahan R.I. ke Ibukota Yogyakarta, disertai dengan penarikan mundur pasukan Belanda di bawah pengawasan UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*).

Setelah Ibukota Yogyakarta sepenuhnya dikosongkan dari pasukan Belanda maka pada tanggal 29 Juni 1949, Tentara Republik Indonesia (TRI) dan Presiden, Wakil Presiden, beserta para pemimpin Republik Indonesia lainnya, kembali ke Ibukota Yogyakarta sehingga mereka dapat menjalankan kembali tugas dan wewenang dalam pemerintahannya seperti semula.

Terjadinya peristiwa Perundingan Roem-Roijen adalah merupakan salah satu cara perjuangan Bangsa Indonesia guna mempertahankan kemerdekaannya melalui strategi diplomasi, sehingga kembalinya kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia ke Ibukota Yogyakarta adalah suatu realitas yang pada gilirannya dapat memulihkan kembali sistem keamanan, ketertiban, dan perdamaian di seluruh tanah air Indonesia, dan akan menjadi daya dorong kuat bagi terselenggaranya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Negeri Belanda.

Saran

Hasil tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai Persetujuan Roem-Roijen ini, diharapkan dapat memberikan motivasi suri tauladan yang luar biasa khususnya bagi generasi muda Bangsa Indonesia, dengan mengambil berbagai contoh, sifat-sifat, serta nilai-nilai juang kepahlawanan dan kewibawaan para *founding fathers* sebagai tokoh-tokoh sejarah yang terlibat langsung dalam

perjuangan Bangsa Indonesia, sehingga pada gilirannya dapat lebih membangkitkan semangat dan rasa nasionalisme serta memantapkan nilai-nilai identitas dan keperibadian bangsa secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboe Bakar Loebis, (1992), *Kilas Balik Revolusi*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Adam Malik, (1962), *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta, Widjaya.
- Ahmad Soebardjo, (1978), *Lahimya Republik Indonesia*, Jakarta, Kinta.
- Burger, (1962), *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid I*, Jakarta, NegaraPradayaparamita.
- Depdikbud, (1991), *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia*, Jakarta.
- Dinas Sejarah Militier TNI-AD, (1972), *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-AD*, Jakarta.
- Heri Sukadri K. et al., (1991), *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur*, Jakarta.
- Ide Anak Agung Gde Agung, (1985), *Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Iwa Kusuma Sumantri, (1965), *Sejarah Revolusi Indonesia Masa Revolusi Bersejarah*, Jilid II, Jakarta, Gunung Agung.
- Kansil C.S.T., Julianto, (1986), *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- Koch D.M.G., (1951). *Menuju Kemerdekaan, Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai 1942*, Terjemahan Abdul Muis, Jakarta, Yayasan Pembangunan.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, (1993), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV, Jakarta, Balai Pustaka.
- Mohamad Roem, (1972), *Bunga Rampai dari Sejarah*, Jakarta, Bulan Bintang
- Nasution A.H., (1973), *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid II, Bandung, Angkasa.
- Pujianti Selvi M., (2011), *Perundingan Roem-Royen Versi I*, [Online]. Tersedia: <http://selvimaharanipujianti.blogspot.com/2011/10/perundingan-Roem-Royen-versi-i.html> (15 Mei 2013)
- Ricklefs M.C., (2008), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Soejitno Hardjosoediro, (1987), *Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Zailani, Dahlan, (2010), *Perjanjian Roem-Royen 7 Mei 1949*, [Online]. Tersedia: <http://gogleak.wordpress.com/2010/08/13/perjanjian-Roem-Royen-7-mei-1949/> (17 Mei 2013)